

JIA

Jurnal Ilmiah Administrasi

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Administrasi Negara/Publik. Artikel teleah (review article) dimuat atas undangan STISIP Muhammadiyah Sidrap.

Pemimpin Umum

DR.H.Jamaluddin, S.Sos., M.Si. (Ketua STISIP Muhammadiyah Sidrap)

Pemimpin Redaksi

Drs. Andi Nilwani, M.Si

Dewan Penyunting

DR.H.Jamaluddin, S.Sos., M.Si.

DR. Mustafa Hasbar, S.E., M.Si.

DR. H. Muchlis Madani, M.Si.

Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si.

Mitra Bestari

Prof. DR. H. Tahir Kasnawi, S.U.

Prof. DR. H. Ramli Dalle, M.Si.

Prof. DR. Rifdan, M.Si.

Penyunting Pelaksana

Dra. Hj. Nurjannah Nonci, M.Si.

Muliani S., S.IP., M.Si.

Herman D., S.IP., M.Si.

Hj. A.Astinah Adnan, S.S., S.Pd., M.Si.

Hariyanti Hamid, S.P., S.Sos., M.Si.

Sekretariat

Erfina, S.Sos.

Kamaruddin S., S.Sos.

A.Nurman N., S.Sos.

Pembantu Sekretariat

Muh.Anis Azhar, S.Sos.

Suparman M., S.IP.

Badrah, S.Sos.

Monalisa, S.Sos.

Rahmah, S.Pd.

Harianto, S.Pd.

Drs. Ansar Wail

Roes Firman, S.Sos.

Barisan

Sinda Madan

Printing

Unit Penerbitan STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Jl.Angkatan 45 No.1A, Rappang, telp/fax: (0421)93308. Alamat email: jia@stisip-sidrap.ac.id
Jurnal Ilmiah Administrasi diterbitkan sejak Agustus 2012 oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS ganda sepanjang kurang lebih 15 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman belakang ("petunjuk bagi calon per Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Dari Redaksi

Syukur Alhamdulillah, pada penerbitan Volume 1 Nomor 2 Desember 2012 telah terbit. Terbitan ini merupakan edisi kedua setelah mendapatkan ISSN dari LIPI Jakarta.

Selanjutnya pada penerbitan ini redaksi menerima berbagai tulisan ilmiah dari berbagai Perguruan Tinggi maupun dari instansi pemerintah. Melalui kesempatan ini redaksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya menyampaikan hasil penelitian dan tulisan ilmiah lainnya untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Administrasi (JIA) ini.

Dan akhirnya kami dari redaksi mengucapkan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya nyata dan memiliki kesempatan untuk menulis di jurnal yang kita cintai ini.

Demikian Salam dari Redaksi, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin

Makassar, Desember 2012

Redaksi

Daftar Isi

Ekonomi Politik di Indonesia pada Era Reformasi dalam Perspektif Liberal	183-195
Hj. Nurjannah Nonci	
Kewenangan Pemerintah Desa Terhadap Otonomi Desa	197-206
Muliani S.	
Analisis Kinerja Aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	207-239
H. Akhyaruddin Hakim	
Pengaruh Penataan Organisasi Terhadap Manajemen Kepegawaian di Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	241-254
Citra	
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pada Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	255-27
Erniwati	
Aktualisasi Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	279-2
Sudirman L.	
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 2 Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang	301
Abdul Haris	

Motivasi dan Tingkat Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Laporan Masyarakat di Kantor Polisi Resort Pinrang	321-34
--	--------

Syamsul

Hubungan Pelatihan Kepemimpinan dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang	345-3
---	-------

Sadariah

Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Terhadap Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang	365
---	-----

Rusnaeni Lappa

Ekonomi Politik di Indonesia pada Era Reformasi dalam Perspektif Liberal

Hj. NURJANNAH NONCI

Abstract

There is this fact that free trade of world globalization implemented by IMF and World Bank is not consistently applying the principles of liberal perspective; to create a real democracy, an efficient political economy, and high economic growth. This implementation adopted by developing countries and developed countries is only creating benefits for certain countries.

Particularly in Indonesia, the political economy policy set by the government in Act Number 44 Year 2007 about free trade, the implementation of IMF and World Bank policy has provided no benefit to economic actors. Neither to Indonesian people, this dimension has provided no economic growth. There is one phenomenon to say that business actors have not qualified to compete globally in international trade arena because of the lower quality products compared to other developed countries using higher technological equipment. Additionally, this policy effects economic instability in Indonesia in this recent reformation era. This policy then has opened a door way in order for capitalism and liberal trading to continue merging global market under World Trade Organization's control.

If this policy is implemented in Indonesia, it would be more irrelevant to create economic growth in Indonesia, as Indonesia had a different history, social structure, culture and politics compared to other countries in which liberalism was born. Therefore this country

has to decide a way to create economic development model suitable to Indonesian economic conditions.

Key words: globalization, political economy, liberal concept.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan suatu negara pada prinsipnya adalah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita suatu bangsa. Untuk merefleksikan peran strategis suatu negara dalam posisinya yang sentral pada pemerintahan, maka melalui kekuasaan politik memutuskan kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Pada prinsipnya tugas politik modern adalah, (Fukuyama, 2005) menjinakkan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya ke arah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum.

Salah satu produk politik pemerintah adalah kebijakan publik dalam sektor ekonomi, pada kebijakan ini terdapat berbagai dimensi yang memengaruhi politiknya, sosial, budaya, politik, dan kelembagaan. Dimensi-dimensi tersebut ikut memengaruhi mekanisme pasar yang terbentuk, karena adanya transaksi ekonomi yang terjadi. Negara atau birokrasi adalah sebuah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam

kehidupan ekonomi (Rachbini, 131, 2006). Oleh sebab itu Negara sebagai entitas sosial politik harus sanggup memainkan peranannya melalui perumusan kebijakan kebijakan strategis pada sektor sosial, politik dan ekonomi.

Berawal dari teori liberal Adam Smith adalah seorang pelopor ekonomi, dalam gagasannya itu masih tetap dipengaruhi oleh aliran ekonomi klasik, yakni mengemukakan konsep bahwa memudarnya dominasi politik tampak jelas di dalam konsep *invisible hand*, yang maknanya adalah tidak perlu memutuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang akan mengatur pasar (regulasi pasar terhadap dirinya sendiri), Caporaso (1992). Oleh sebab itu pemerintah tidak perlu mengintervensi atau membuat kebijakan tentang jalannya sebuah perekonomian dalam suatu negara. Para pelaku ekonomi diberikan kesempatan berkreasi dalam mekanisme pasar dan persaingan antar bisnis. Pembatasan peran politik pemerintah terhadap sektor ekonomi diharapkan dapat memberikan ruang bebas kepada pelaku ekonomi untuk menggairahkan pasar, sehingga

dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan *outcome* bagi masyarakat.

Selanjutnya Caporaso masih mempunyai *statement* yang tak kalah pentingnya, dengan konsep sebelumnya, yakni konsep yang memandang bahwa individu merupakan pelaku yang menentukan sikap dan perilakunya sendiri terhadap pilihan-pilihan yang berkaitan dengan pandangan, pemikirannya serta kebutuhannya, yang merupakan salah satu substansi konsep dari liberalis atau neoklasik. Berdasarkan pemilihan yang diambil dari beberapa alternatif itu, sudah tentu melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, tentang apa saja dampak yang akan timbul, jika pengambilan keputusan tersebut dilakukan, (Caporaso 79-81,1992). Adanya pergeseran nilai itu, mengakibatkan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi politik, yakni masyarakat semakin menuntut adanya kebijakan yang mendukung pilihan rasional. Konsep tersebut diharapkan dapat mewujudkan sebuah pasar yang sempurna dimana antara *supply* dan *demand* bergerak seperti apa adanya, dengan prinsip bahwa, biarlah pasar yang mengatur dirinya sendiri, tanpa perlu campur tangan atau intervensi dari pemerintah.

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya di Indonesia ketika era reformasi

tentunya tidak lepas dari dinamika sosial dan politik. Kondisi ini nampak dari beberapa fenomena yang berkembang terkait dengan kebijakan moneter, setelah diguncang oleh krisis ekonomi dunia termasuk Indonesia juga merasakan imbas dari gejolak itu. Maka ketika itu pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Sehingga memengaruhi semua sektor yang berkaitan langsung dengan aspek kehidupan manusia. Jika sektor ekonomi bermasalah maka secara otomatis berpengaruh terhadap aspek yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Bahkan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi makro suatu Negara.

Kebijakan ekonomi internasional tentang globalisasi era pasar bebas yang diapresiasi oleh pemerintah Indonesia, menimbulkan analisis yang bervariasi. Baik oleh kalangan pengusaha, praktisi dan akademisi, ada yang beranggapan dengan adanya kebijakan dapat memengaruhi kondisi perdagangan yakni semakin memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia, salah gejalanya adalah, kualitas barang Indonesia jauh di bawah standar internasional. Sehingga kalah bersaing pasar internasional. Ada yang berpendapat bahwa akan memotivasi para pelaku dalam berkompetisi.

Jika dianalisis dari perspektif liberal klasik, dikaitkan dengan kebijakan pasar bebas, yang termaktub dalam UU. No.44. Tahun. 2007 tentang perdagangan bebas. Lahirnya kebijakan tersebut diharapkan dapat membangun pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan secara merata. Selanjutnya pernyataan yang dikemukakan oleh Benyamin Higgins, (23, 2003), bahwa rezim orde baru mewariskan satu struktur perekonomian nasional yang buruk, ia menjelaskan pula bahwa Indonesia merupakan contoh negara berkembang yang paling gagal melaksanakan proses pembangunan ekonomi.

B. TEORI EKONOMI POLITIK DARI PERSPEKTIF LIBERAL KLASIK

Setelah kekalahan Napoleon tahun 1815, reaksi Konservatif menyapu seluruh Eropa sehingga pemerintah mulai memperkuat negaranya terhadap tuntutan demokrasi dan kebebasan individu. Apapun bentuk kecemasan yang ia ungkapkan soal kapitalisme, tujuan Adam Smith adalah mempertahankan pasar bebas dan non intervensi pemerintah. Sepanjang abad tujuh belas dan delapan belas, kebijakan merkantilis melibatkan pemerintah dalam pengenaan pajak perdagangan, membuka pasar baru di luar negeri, melindungi perusahaan dari persaingan, dan menjamin

mutu produk. Smith percaya campur tangan pemerintah mengganggu manfaat potensial pasar bebas. Ia mengusulkan idenya agar pemerintah dibatasi dalam tiga fungsi: penegakan hukum, pencetakan uang, dan penyediaan barang-barang publik seperti pelabuhan dan jalan raya. (Clarck, 1998).

Meskipun banyak unsur dari pemikiran awal Smith yang tetap dianut sampai sekarang (terutama dalam aliran neo klasik), namun ilmu ekonomi neo klasik, bukan sekedar versi modern dari ekonomi politik klasik. Bahkan pendekatan neoklasik dianggap lahir pada dekade 1870 bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Setelah dekade 1870 ilmu ekonomi banyak mengalami perubahan. Yang pertama, aliran marginalis mengajukan teori nilai yang didasarkan kepada intensitas dari perasaan subyektif teori kegunaan subyektif (*subjective utility theory*); kedua adalah aliran marginalis mengembangkan kalkulus marginal sebagai sarana konseptual dan metodologis (Caporaso, 79, 1992).

Berawal dari latar belakang tersebut selama 3 sampai 4 dekade setelah lahirnya suatu aliran baru yang dianggap sebagai aliran neo-klasik yang berhasil menggeser teori nilai tenaga kerja (teori mengatakan bahwa nilai barang/komoditas ditentukan oleh nilai dari tenaga kerja).

diperlukan untuk menghasilkannya) dan menggantikannya dengan teori nilai yang berbasis kegunaan subyektif dan membuat ide "produk marginal" dan "permintaan akhir" menjadi dua ide utama, sementara konsep produk total dan permintaan total menjadi tergeser peranannya. Pemikiran-pemikiran ini makin tersebar luas selama seperempat abad lamanya, terakhir di abad XIX, perekonomian tidak lagi dipandang semata sebagai produksi dan reproduksi materi, melainkan sebagai logika dari tindakan manusia (Caporaso 89-80, 1992).

Dari beberapa konsep sebelumnya, penulis dapat menganalisis bahwa, dalam liberalisme klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan-agungkan. Setiap individu memiliki sikap dan pengetahuan masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham yakni kebebasan politik, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Namun, meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang diinginkan dan dimiliki individu tersebut adalah kebebasan mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan hak azasi yang harus dipertanggungjawabkan, jadi tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini atau dengan kata lain, bukan bebas yang tanpa batas dan kontrol.

Perspektif liberal mengilhami lahirnya kebijakan pasar bebas, yang merupakan

suatu bentuk intervensi dari institusi internasional terhadap pemerintah Indonesia, maka dengan niat yang baik dari intervensi tersebut, diadopsi oleh pemerintah Indonesia kemudian melahirkan suatu kebijakan yang menjadi rujukan perekonomian di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan dari (*IMF, World bank*), yang harus dipenuhi oleh negara yang termasuk negara sedang berkembang. Kondisi seperti itu, butuh bantuan dana, untuk membangun negaranya. Sehingga kesempatan tersebut, dimanfaatkan oleh negara-negara maju sebagai anggota dari perhimpunan organisasi internasional untuk mengintervensi melalui kekuatan politiknya. Fenomena itu menarik karena terkait dengan kebijakan pasar bebas, yang kelihatannya kebijakan tersebut sangat bernuansa politik bagi negara barat dalam menerapkan praktek liberalis.

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Liberalisme terdiri dari dua macam, (a) liberalism klasik, (b) liberalism modern. Liberalisme klasik lahir pada abad ke 16. Sedangkan liberalisme modern lahir sejak abad ke 20. Namun, bukan berarti setelah ada liberalisme modern, maka liberalis klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh liberalis modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari liberalisme klasik itu masih ada. Liberalisme modern tidak mengubah

hal-hal yang mendasar, hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya tidak berubah, tetapi ada tambahan-tambahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya konsep liberal klasik itu tidak pernah musnah (Ricardo, /http/id.wikipedia.org. wiki ekonomi liberal). Liberal klasik merupakan salah satu perspektif politik ekonomi, menurut sejarah perkembangannya adalah sebagai berikut, sebelum lahir liberal klasik terlebih dahulu diawali dengan perspektif politik ekonomi yang beraliran klasik, kemudian dilanjutkan dengan perspektif neo klasik, perkembangan selanjutnya lahirlah ekonomi aliran Austria. Ekonomi Austria ini, terbagi atas tiga bagian, yakni pertama, Neo Austrian Economics; kedua, *Public Choice theory*; dan ketiga *new classical economic* (Clarck, 1998, 24).

Karena menyoroti pilihan individu sebagai determinan *outcome* sosial, liberalisme klasik sangat layak diekspresikan dalam bentuk teori ekonomi. Perkembangan historis liberalisme klasik erat kedudukannya dengan sejarah pemikiran ekonomi, dimulai dari ekonomi politik, sampai kepada ekonomi neo klasik Austria dan diakhiri dengan pemikiran antara lain ekonomi neo-Austria, ekonomi institusional baru, ekonomi konstitusional, libertarianisme, ekonomi sisi penawaran, dan teori hak milik (Barry,

Norman, 1998). Pada dasarnya liberal klasik berasal dari pandangan Neo-klasik, perkembangan selanjutnya, neo-klasik yang melahirkan dua perspektif perspektif Austria, dan perspektif Chambridge. Berikutnya dari perspektif Austria melahirkan perspektif liberal klasik. Dari perspektif ini dapat kita lihat bagaimana pandangan perspektif liberal klasik dalam politik ekonomi.

Menyikapi beberapa teori yang dikemukakan di atas tentang perspektif liberal klasik, ada beberapa hal yang mendasar substansi dari perspektif tersebut. Prinsipnya konsep liberalisme mempunyai persamaan, antara lain adalah, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak individual, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai optimis, egalitarisme. Liberalisme klasik sangat cocok dilaksanakan dalam bentuk teori ekonomi. Perkembangan selanjutnya liberalisme klasik kedudukannya dengan sejarah pemikiran ekonomi, dimulai dari ekonomi politik. Argumen yang dikemukakan (Clark, 1998) menjelaskan tentang perspektif liberal klasik, bahwa menilai masyarakat sebagai kumpulan individu otonom berusaha memenuhi kepentingan pribadi. Idealnya, semua interaksi sosial hendaknya adalah pertukaran sukarela sesama manusia dan setiap individu memiliki hak merdeka

hal-hal yang mendasar, hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya tidak berubah, tetapi ada tambahan-tambahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya konsep liberal klasik itu tidak pernah musnah (Ricardo, /http/id.wikipedia.org. wiki ekonomi liberal). Liberal klasik merupakan salah satu perspektif politik ekonomi, menurut sejarah perkembangannya adalah sebagai berikut, sebelum lahir liberal klasik terlebih dahulu diawali dengan perspektif politik ekonomi yang beraliran klasik, kemudian dilanjutkan dengan perspektif neo klasik, perkembangan selanjutnya lahirlah ekonomi aliran Austria. Ekonomi Austria ini, terbagi atas tiga bagian, yakni pertama, Neo Austrian Economics; kedua, *Public Choice theory*; dan ketiga *new classical economic* (Clark, 1998, 24).

Karena menyoroti pilihan individu sebagai determinan *outcome* sosial, liberalisme klasik sangat layak diekspresikan dalam bentuk teori ekonomi. Perkembangan historis liberalisme klasik erat kedudukannya dengan sejarah pemikiran ekonomi, dimulai dari ekonomi politik, sampai kepada ekonomi neo klasik Austria dan diakhiri dengan pemikiran antara lain ekonomi neo-Austria, ekonomi institusional baru, ekonomi konstitusional, libertarianisme, ekonomi sisi penawaran, dan teori hak milik (Barry,

Norman, 1998). Pada dasarnya liberal klasik berasal dari pandangan Neo-klasik, perkembangan selanjutnya, neo-klasik yang melahirkan dua perspektif, yakni perspektif Austria, dan perspektif Chambridge. Berikutnya dari perspektif Austria melahirkan perspektif liberal klasik. Dari perspektif ini dapat kita lihat bagaimana pandangan perspektif liberal klasik dalam politik ekonomi.

Menyikapi beberapa teori dikemukakan di atas tentang perspektif liberal klasik, ada beberapa hal yang mendasar substansi dari perspektif tersebut. Prinsipnya konsep liberalisme klasik mengemukakan persamaan, antara lain adalah, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak-hak individual, nilai-nilai demokrasi, kebebasan, nilai-nilai optimis, egalitarisme. Liberalisme klasik sangat cocok dilaksanakan dalam bentuk teori ekonomi. Perkembangan selanjutnya liberalisme klasik kedudukannya dengan sejarah perkembangan ekonomi, dimulai dari ekonomi klasik. Argumen yang dikemukakan (Clark, 1998) menjelaskan tentang perspektif liberal klasik, bahwa menilai masyarakat sebagai kumpulan individu otonom yang berusaha memenuhi kepentingan pribadi. Idealnya, semua interaksi sosial hanya didasarkan pada pertukaran sukarela sesama masyarakat, dan setiap individu memiliki hak merdeka.

penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Pada prinsipnya, pendekatan neo klasik dilatarbelakangi oleh konsep tentang usaha yang dilakukan untuk mewujudkan, kebutuhan individu dan masyarakat atau warga negara. Perkembangan selanjutnya adalah berdasarkan konsep tersebut, maka diaplikasikan dengan harapan untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat atau warga negara, yang terdiri dari beberapa individu yang saling terkait. Kesejahteraan yang dialami warga negara tidak lain adalah, kesejahteraan yang terwujud dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kelompok, dan individu. Oleh sebab itu, sebuah kelompok dapat merasakan kesejahteraan yang proporsional, ketika semua anggota dari kelompok itu mampu memaksimalkan kesejahterannya masing-masing, selanjutnya kesejahteraan dari semua individu dalam kelompok itu saling mempengaruhi satu sama lain.

Argumen Jeremy Bentham 1748-1832 (lihat Clarc, 1998), bahwa kritik liberal klasik dimulai dengan mendiskreditkan paham Locke, yakni filsuf Inggris. Teoritis hukum Jeremy Bentham dalam *An introduction to the principles of morals and legislation* (1789), ia mengklaim bahwa rasa sakit dan senang adalah satu-satunya determinan perilaku manusia dan satu-satunya kriteria

benar dan salah. Baik perorangan maupun masyarakat dalam arti luas, arah bertindak yang baik adalah yang memaksimalkan kesenangan (kebahagiaan/kesejahteraan) dan meminimalkan rasa sakit (tekanan). Untuk memahami motif Bentham yang mengganti hukum alam dengan utilitarianisme, hendaknya harus fokus pada perubahan lingkungan politik Inggris akhir abad kedelapan belas.

Demokrasi dan kebebasan tidaklah dimaknai secara sempit, melainkan nilai itu merupakan salah satu faktor yang dapat merealisasikan suatu masyarakat yang sejahtera dapat terwujud, ketika aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kebutuhan yang dilakukan individu yang satu dengan individu lainnya dalam suatu kelompok, bisa bermanfaat terhadap individu lain dalam kelompok tersebut. Sebaliknya meskipun tidak melakukan aktifitas yang sama individu yang satu dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu yang lain bahkan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan kelompok. Interaksi dan kontribusi ini dapat terdistribusi secara merata, sehingga dampaknya dapat mewujudkan kesejahteraan yang adil di suatu Negara.

Perhatian para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dan para praktisi, terdapat sejak akhir 1980an, dunia telah menyai

berbagai gejolak dan revolusi sosial politik di Negara-negara sosialis dan diakhiri dengan runtuhnya sosialisme di Uni Soviet. Gelombang kapitalisme yang kokoh yang dibangun oleh Lenin pada tahun 1917 di Rusia dan mengakhiri perang dingin antara blok sosialis dengan blok kapitalis. Sejak itu, perang ideologi digantikan oleh perang melawan kemiskinan oleh semua negara di dunia. Perkembangan selanjutnya, kapitalisme seakan-akan satu-satunya pilihan, disusul oleh liberalism perdagangan yang semakin menyatukan pasar global di bawah kendali *World Trade Organization*. Globalisasi telah mempertipis garis batas antar negara, antar bangsa, dan antar budaya, mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat internasional. (Tikson, 17-18.2011).

Peran strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat mewujudkan pemerintah yang efektif, peran ini tidak hanya dibutuhkan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih keberhasilan pembangunan ekonomi. Jika suatu rezim tertentu tidak dapat diandalkan untuk melaksanakan proses pembangunan secara kompeten dan jujur, rezim tersebut akhirnya akan dipaksa untuk melakukannya karena tekanan politis yang semakin keras, atau rezim tersebut akan kehilangan kekuasaannya, mungkin melalui

PEMILU, atau dengan cara lain (Tolson, M.P, Smith S.C 2002)

Peran negara pada prinsipnya ada peran pemerintah (sektor public), untuk memberikan pelayanan, memberdayakan dan mensejahterakan rakyatnya, dan perannya organisasi meskipun swasta tujuannya ada mencari keuntungan. Namun swasta memainkan peranan dalam pasar ekonomi masyarakat, sedangkan negara harus juga dilihat dari perspektif norma. Hal ini perlu dilakukan untuk membuat kebijakan ekonomi yang efektif. Kita berbicara tentang kebijakan ekonomi, berkaitan dengan bagaimana peran tujuan negara dalam menstabilkan perekonomian. Politik ekonomi suatu negara dapat dilihat dari bagaimana peran pemerintah membuat suatu kebijakan perekonomian, yakni bagaimana mengimplementasikan kebijakan kepada pelaku ekonomi, dan masyarakat sebagai konsumen. Namun kebijakan seyogianya berpihak kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu antara konsumen dan produsen, pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat.

PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI DENGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS

Kebijakan UU No.1 Tahun 2007, yang membahas tentang perubahan atas Undang-undang No. 36 Tahun 2000 tentang wewenang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2000, yang terkait dengan perdagangan bebas dan pelabuhan menjadi undang-undang lembaran atas Undang-Undang No.130 Tahun 2003. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan perdagangan bebas menjadi Undang-Undang. Jika mencermati tentang peran negara dalam kebijakan ekonomi politik suatu negara maka dapat dianalisis bagaimana pemerintah memformulasi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan itu. Apakah negara dunia ketiga akan masuk kedalam perangkap negara maju, dengan alasan untuk menerapkan kebijakan pasar bebas yang bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan mempromosikan stabilitas ekonomi, IMF dengan kedok untuk mencapai tujuan ekonomi politik, melalui ekonomi liberal selalu menghimbau

negara-negara berkembang untuk secara besar-besaran menerapkan kebijakan liberalisasi pasar. Bank dunia juga senantiasa mengontrol setiap proyek pemberian pinjamannya, untuk menjamin proyek-proyek yang dimaksud pasti diselenggarakan oleh sektor swasta (Todaro, Smith, 2006).

Seperti itulah kondisi kebijakan ekonomi politik di Indonesia dengan mengadopsi kebijakan pasar bebas, yaitu perdagangan liberalisasi pasar, yang merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan dari organisasi-organisasi internasional (IMF, World bank) bagi negara dunia ketiga yang butuh bantuan dana, untuk membangun negaranya. Kebijakan itu diharapkan dapat menstabilkan perekonomian, dan mensejahterakan masyarakat, agar produk-produk Indonesia dapat bersaing dengan produk yang berasal dari negara lain, pelaku ekonomi dalam negeri, dengan produknya dapat bersaing dengan barang-barang impor. Namun sayangnya produk Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk impor, karena produk Indonesia kurang berkualitas jika dibandingkan barang-barang import. Pilihan konsumen lebih berminat pada barang-barang impor, yang kualitasnya memang jauh lebih bagus, jika dibandingkan

dengan barang-barang produk dalam negeri dan harganya yang relatif lebih murah.

Terkait dengan kebijakan perdagangan bebas, seharusnya bertujuan untuk dapat mewujudkan keunggulan komparatif, stabilitas perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun ironisnya kebijakan UU No. 44 Tahun 2007 berdampak terhadap ketidakberdayaan pelaku ekonomi di Indonesia, khususnya pelaku ekonomi usaha kecil menengah. Sehingga, dengan demikian liberalisasi pasar tidak berpihak kepada kebutuhan rakyat. Hanya menguntungkan dan mewujudkan kepentingan pelaku ekonomi, dan politik ekonomi dari negara-negara tertentu.

Teori liberal menurut Damnahuri (2010), mempunyai kelemahan antara lain; (1) bias terhadap sejarah dan kisah sukses negara industri maju di barat, (2) pendekatan yang dipakai adalah pendekatan linear, penyeragaman dan homogenisasi dalam rekayasa sosial, ekonomi, dan politik, (3) teori liberal sering menghancurkan nilai lokal, tradisional, dan peran agama, menghilangkan kearifan lokal tradisional, motivasi, solidaritas sosial berbasis agama, (4) kurang mengapresiasi prinsip kerja sama dan saling percaya yang berbasis pada hubungan sosial dan spiritual, baik dalam pencapaian prestasi ekonomi, maupun politik, (5) adanya *over optimistic* dalam

peramalan ekonomi maupun politik, sering bertentangan dengan hasil-hasil dalam aplikasi teori.

Khususnya di Indonesia pada reformasi sekarang ini, meskipun pemerintah sudah mengimplementasikan UU. No. 22/1999 dengan sistem pemerintahan yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk mengatur tangganya sendiri. Namun kondisi pada reformasi ini, dimana pelayanan masih merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai agen tunggal berkuasa atau sebagai regulator, yang dan selalu berinisiatif dalam mengatur mengambil langkah dan prakarsa, menurut mereka penting atau baik masyarakat karena diasumsikan masyarakat adalah pihak yang pasif, tidak mampu, dan harus tunduk dan menerima saja yang diatur oleh pemerintah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang taat kepada kebijakan yang dibuat Negara-negara *super power* tersebut. Sehingga kebijakan ekonomi politik, dibuat oleh pemerintah yaitu UU No. 44 Tahun 2007 tentang perdagangan internasional merujuk kepada kebijakan perdagangan global tersebut. Namun setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, maka hasil yang dicapai tidak memberi dampak menguntungkan bagi pelaku ekonomi

rakyat Indonesia. Justru sebaliknya yang terjadi yaitu, dampaknya melahirkan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pada era reformasi ini. Bahkan kebijakan tersebut justru memberikan lagi peluang bagi negara-negara pengeksport untuk menjalankan praktek-praktek kapitalisme di Indonesia. Atau liberalisme perdagangan yang semakin menyatukan pasar global di bawah kendali *World Trade Organization* untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan teori liberal di samping memberi dampak negatif juga memberi dampak yang positif seperti yang dikemukakan oleh (Damanhuri, 2010) misalnya, teori ini memberi ruang kepada individu atau pelaku ekonomi untuk berpikir, berperilaku kreatif, inovatif dan *entrepreneurship*, berani membuat terobosan, menekankan nilai-nilai efektif dan efisiensi, bertata kelola bersih dan baik (*clean dan good governance*), di tingkat individu, pelaku ekonomi, pengusaha dan pemerintahan. Menekankan adanya persaingan yang mampu mendorong pada kualitas tinggi, pemikiran dan aksi, baik dalam bentuk *input, output, dan outcome*, dalam mata rantai kegiatan ekonomi.

D. KESIMPULAN

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Teori liberalis terdiri dari , (a) liberalism klasik, (b) liberalism modern. Liberalisme klasik lahir pada abad ke 16. Sedangkan liberalism modern lahir sejak abad ke 20. Namun, bukan berarti setelah ada liberalis modern, maka liberalis klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh liberalism modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari liberalisme klasik itu masih ada. Liberalisme modern tidak mengubah aspek-aspek yang mendasar, hanya mengubah aspek lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya tidak berubah, tetapi ada tambahan-tambahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya masa liberalisme klasik itu tidak pernah pudar dan berakhir.

Konsep tentang liberal klasik, tidak sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh institusi internasional, atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara-negara super power. Kebijakan itu diadopsi oleh Negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara maju. Khususnya di Indonesia kebijakan tentang perdagangan bebas mengakibatkan dampak negatif yaitu perekonomian yang tidak efisien sehingga merugikan pengusaha, terutama pengusaha yang bermodal relative masih terbatas, tujuan distribusi pendapatan akan merata, tidak

dapat direalisasikan, yang pada akhirnya tidak memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melainkan, dampaknya hanya menguntungkan negara-negara tertentu.

Meskipun dampak positif yang terdapat dalam teori liberal tersebut merupakan nilai-nilai yang pada dasarnya wajar jika dapat diadopsi oleh Negara-negara yang sedang berkembang, karena berakibat terhadap ekonomi politik yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi, namun di sisi lain negara-negara yang sedang berkembang tersebut terbatas dari segi penguasaan IPTEK, sosial, budaya, dan politik yang berbeda karakteristiknya dengan negara-negara asal kelahiran dari teori tersebut. Jika teori liberal ini akan diaplikasikan pada suatu negara, maka perlu adanya adaptasi teori tersebut. Bukan berarti teori tersebut harus diaplikasikan secara pemaksaan kepada negara yang membutuhkan bantuan. Perkembangan selanjutnya produk dari teori itu yang bewujud suatu kebijakan ekonomi politik, maka hal ini juga seyogianya diadaptasikan terlebih dahulu, kemudian diimplementasikan, agar apa yang direncanakan dapat direalisasikan dengan sukses.

Idealnya suatu kebijakan berorientasi kepada kepentingan rakyat, khususnya di

Indonesia, misalnya kebijakan tersebut bergantung pada sikap dan peran negara dalam *political will*. Seharusnya pemerintah ketika memformulasikan, memutuskan, mengimplementasikan kebijakan ekonomi politik hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat serta berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat, demikian kata lain, peran negara harus memberikan penguatan terhadap upaya untuk mewujudkan *happiness* kepada warganya yang tidak lain adalah mengusahakan terwujudnya *welfare state*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry, Clark, 1998; *Political Economy: a comparative approach*, Praeger Publisher; London
- Barry, Norman; 1998; *Limited government: Individual liberty and the Rule of law*; Edward Elgar.
- Didin S Damanhuri, 2010; *Ekonomi Politik dan Pembangunan, Teori, Konsep dan Solusi bagi Negara Berkembang*; PT. Penerbit Pustaka Press; Kampus IPB, Taman Kencana Bogor.
- Didik Rachbini, Rachbini, J, Didik; *Ekonomi Politik: Paradigma Baru Teori Pilihan Publik; (Studi Kasus Indonesia)*;

- Jakarta.
- Fukuyama F 2005; *Memperkuat Negara* (penerjemah A.Zaim R); Kerjasama Kedubes AS, freedom Institute, dan PT Gramedia, Jakarta.
- James A Caporaso, David P.Lavine; 1992, *Theories of Political Economy*; Cambridge University Press, Cambridge.
- Stiglitz, E Joseph; 1988; *Economic of The Public Sector*; WW. Norton and co; New York.
- Todaro MP, Smith SC, 2002; *Pembangunan Ekonomi* jilid 2 (alih bahasa Andri Elvy); Erlangga; Ciracas; Jakarta.
- Deddy DTikson, 2011, *Tantangan Administrasi Negara Menghadapi Ketimpangan Global* (Pidato Pengukuhan Guru Besar), UNHAS.
- Weingast, Barry dan, Donald; 2008; *The Oxford Hand Book of Political economy*; Oxford University Press; England.
- UU. NO. 44. TAHUN 2000, Tentang perdagangan bebas, 2008
<http://www.bappenas.go.id/node/130/55/pp-pengganti-uu-no-2-tahun-2000-tentang-kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-sabang/>
- David Ricardo / http://id.wikipedia.org/wiki/ekonomi_liberal, 2011.